

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SASARAN MAKRO REPELITA III

R.B. SUHARTONO

PENDAHULUAN

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1978, telah dinyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi secara riil dalam Repelita III diperkirakan akan mencapai 6,5 prosen rata-rata tiap tahunnya dan untuk industri di sekitar 11 prosen. Melihat pengalaman masa lalu dan prospek yang akan datang, sasaran-sasaran tersebut kelihatannya dapat dicapai. Bahkan untuk sektor industri ada kemungkinan dapat dilampaui, mengingat potensi-potensi yang ada pada saat ini.

Dengan dikaitkannya pola industri dengan Krida Pertama Kabinet Pembangunan III, kemungkinan masih terbuka lebar untuk memperluas bidang aktivitas sektor industri melalui perluasan produksi yang memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Pertumbuhan tidak hanya dapat dicapai melalui perluasan bidang, tetapi juga dengan memperdalam struktur industri, yakni dengan jalan memperbesar bagian-bagian dari kebutuhan sektor industri yang dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa hasil industri hanya dapat mencapai, dan dengan demikian memenuhi kebutuhan rakyat banyak, kalau harganya sesuai dengan tingkat daya beli rakyat banyak. Di lain pihak, dalam bidang tertentu sifat proses produksi sedemikian

rupa hingga harga hanya dapat ditekan kalau volume produksi tinggi. Dengan kata lain, pasaran luas memerlukan harga penjualan rendah, harga penjualan rendah memerlukan biaya produksi rendah, biaya produksi rendah memerlukan volume produksi tinggi, dan volume produksi tinggi membutuhkan pasaran luas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam membimbing dan membina sektor industri, perlu adanya usaha yang tujuannya adalah menjamin adanya perluasan pasar dengan memperluas bidang dan memperdalam struktur industri serta memperbesar daya beli rakyat banyak. Ruang lingkup perluasan pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga dapat menjangkau luar negeri. Bagaimana pun, syarat mutlak keduanya agar mencapai tingkat maksimal adalah cukup rendahnya biaya produksi sehingga dapat bersaing dengan hasil produksi negara-negara lain. Jadi yang menjadi masalah utama adalah bagaimana caranya menjamin dicapainya tahap-tahap penurunan biaya produksi. Masalah ini rumit, dan implikasi penyelesaiannya luas, sehingga tidak dapat ditangani oleh satu departemen saja. Penangulangannya memerlukan kerjasama antar departemen, misalnya di antara departemen-departemen Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, Listrik dan Energi, Pengangkutan.

Sebagai catatan terakhir dapat dikemukakan bahwa dalam rangka kerjasama ASEAN daya saing Indonesia di bidang ekonomi agak lemah. Strategi perindustrian yang ditujukan pada penurunan biaya produksi tidak hanya akan memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga lebih memantapkan partisipasi Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN.

1. PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI

Dalam Repelita I laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sedangkan sektor industri lebih dari 9%. Sesudahnya, pada tiga tahun pertama Repelita II (1974-1976), laju pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,6% yang antara lain disebabkan oleh gejolak perkembangan ekonomi internasional. Walaupun sek-

ANALISA

tor-sektor yang menentukan produksi nasional pada umumnya juga menunjukkan laju pertumbuhan yang menurun, di sektor industri laju pertumbuhannya secara rata-rata justru naik dan mencapai sekitar 12%.

Pada waktu 6 tahun terakhir ini (1971-1976), pertumbuhan industri pesat dan laju pertumbuhannya rata-rata 15% setahun. Penggunaan tenaga kerja di sektor industri naik dengan 7,6% setahun, dan sektor industri menyerap hampir 20% dari seluruh tenaga kerja baru. Walaupun laju pertumbuhannya pesat, dan peranannya penting dalam menyediakan kesempatan kerja baru, namun hasil industri di dalam tahun 1976 masih hanya merupakan sekitar 12% dari pendapatan nasional dan mempergunakan kurang dari 10% tenaga kerja. Angka-angka ini, yang menunjukkan peranan industri dalam pembentukan pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja, secara relatif rendah dibandingkan dengan angka-angka di negara-negara ASEAN lainnya.

Investasi di sektor industri, yang disetujui BKPM, terus menaik hingga tahun 1973 dan kemudian menurun. Di tahun 1977 terlihat adanya kenaikan lagi walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat puncak untuk tahun 1973. Berdasarkan data yang ada cukup dapat diragukan bahwa secara riil jumlah investasi ini dalam Repelita III tiap tahunnya dapat melebihi jumlah yang tercapai di tahun 1973. Karena kelesuan investasi ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya pasaran, kurang tentunya iklim investasi, kelambatan pemberian ijin, dan adanya hambatan yang dihadapi pengusaha, kebijaksanaan yang tepat dapat mengubah situasi dan merangsang penanaman modal baru.

Bagaimanapun juga, walaupun keadaannya tetap seperti yang terbayang sekarang, tidak meningkatnya investasi secara riil (yang melalui BKPM) bukan berarti akan mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan sektor industri. Ini disebabkan karena dua faktor utama. Pertama, di waktu yang lalu pada umumnya pertumbuhan industri lebih disebabkan oleh penambahan sarana produksi, bukan oleh peningkatan produktivitas.

Di beberapa cabang industri laju pertumbuhan kapasitas produksi lebih cepat dari laju pertumbuhan hasil produksi. Dengan demikian pendayagunaan kapasitas produksi belum maksimal (misalnya produksi besi beton baru merupakan sepertiga kapasitas, tekstil setengah sampai dua pertiga kapasitas, dan sebagainya). Dalam hal ini produksi dapat diperbesar tanpa menaikkan investasi modal tetap, tetapi cukup melalui peningkatan produktivitas. Faktor kedua adalah kenyataan bahwa beberapa investasi yang disetujui sekarang ini realisasinya efektif baru akan menambah sarana produksi pada masa Repelita III.

Dengan adanya perbaikan keadaan pasaran, penggunaan kapasitas produksi yang ada dapat lebih ditingkatkan sedangkan yang baru juga dapat digunakan secara efisien. Berdasarkan data investasi yang ada sukar dipastikan apakah laju pertumbuhan industri enam tahun terakhir ini dapat dicapai lagi, dan sementara ini sasaran laju pertumbuhan sebesar 11% lebih realistis untuk dipakai sebagai patokan.

2. STRUKTUR INDUSTRI

Berdasarkan sensus industri BPS tahun 1973, struktur industri didominasi oleh produksi barang konsumsi ringan yang memproses hasil-hasil pertanian dan kehutanan. Pola investasi tahun-tahun 1968 — 1976 disertai oleh laju pertumbuhan yang lebih cepat dari industri berat (14,6% setahun) dibandingkan dengan industri ringan (11,2% setahun). Bagian dari industri berat meningkat dari 48% di tahun 1968 ke 53% di tahun 1975 sedangkan industri ringan menurun dari 52% ke 47%.

Dalam tabel input-output yang disusun BPS untuk tahun 1971 kelihatan bahwa perbandingan antara upah terhadap nilai tambah di beberapa cabang industri tinggi, sehingga cabang-cabang ini dapat diberi perhatian dalam rangka usaha pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Angka-angka perbandingan ini mencapai 40-50% di cabang-cabang industri mesin (listrik dan bukan listrik), pupuk, hasil tambang bukan mineral, dan kayu serta hasil-hasil kayu; antara 30-40% untuk

ANALISA

besi baja, tekstil (termasuk spinning) dan kulit, prefabricated barang logam, produksi dan reparasi alat transpor, dan kertas; dan di bawah 20% untuk lainnya.

Dari tabel tersebut dua hal penting juga dapat disimpulkan, yakni mengenai peranan impor dan kaitan ke belakang serta ke depan (backward and forward linkages) dari cabang-cabang industri. Dalam tiga cabang industri produksi dalam negeri hampir tidak berarti: untuk mesin impor di sekitar 19 kali lipat produksi dalam negeri, dan untuk pupuk serta besi dan baja di sekitar 6-7 kali. Di cabang-cabang tertentu peranan impor masih cukup penting dan mencapai antara 50-90% dari produksi dalam negeri, misalnya untuk processing makanan, spinning, kertas, kimia, semen dan prefabricated barang logam. Usaha giat dalam substitusi impor ternyata dalam praktek tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga dapat menimbulkan kemampuan mengekspor (misalnya pupuk dan semen).

Kaitan ke belakang (backward linkages) menunjukkan sampai di mana satu cabang industri menggunakan sebagai bahan baku hasil industri-industri lain. Kaitan ke depan (forward linkages) menunjukkan sampai di mana hasil satu cabang industri dipergunakan oleh industri-industri lainnya. Dengan sendirinya makin tinggi tingkat kaitan satu cabang industri, makin besar pula efek pertumbuhan industri tadi terhadap pertumbuhan industri-industri lainnya. Menurut tabel input-output tadi, di tahun 1971 enam cabang industri mempunyai tingkat-tingkat kaitan yang tinggi: spinning, pupuk, pengilangan minyak, hasil-hasil karet, semen, serta besi dan baja. Di cabang-cabang industri lainnya tingkat-tingkat kaitannya rendah, termasuk industri mesin, kimia, kertas. Rendahnya tingkat-tingkat kaitan ini berbeda dengan pola yang umum dijumpai di negara-negara berkembang lainnya, disebabkan karena besarnya peranan impor di Indonesia.

Berdasarkan struktur industri sekarang, dan pengaruhnya terhadap perluasan lapangan kerja, penurunan ketergantungan pada impor (terutama dengan prospek neraca pembayaran yang

kurang menggembirakan) dan peninggian tingkat-tingkat kaitan ke belakang dan ke depan, kelihatannya cabang industri "engineering" yang menghasilkan barang-barang modal dan bahan-bahan baku perlu lebih dibina dan dikembangkan. Umumnya cabang industri ini cukup efisien pada skala produksi yang relatif kecil, dan dengan demikian dapat diarahkan ke proses produksi yang padat karya. Juga tingkat-tingkat kaitan cabang industri ini tinggi sehingga pertumbuhannya yang pesat akan menimbulkan akibat-akibat berantai yang besar dan dengan demikian lebih memperdalam struktur industri. Cabang industri ini peranannya vital untuk kelangsungan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Bahkan menurut perhitungan Bank Dunia (dokumen No. 1647-IND) cabang industri ini di waktu yang akan datang dapat merupakan bottleneck.

Di waktu yang lalu cabang industri engineering berkembang pesat, baik ditinjau dari segi pertumbuhan produksi maupun dari pertambahan penggunaan tenaga kerja. Tetapi pertumbuhannya tidak seimbang: sangat pesat dalam industri mobil dan elektronik; lamban dalam cabang-cabang lainnya (terutama produksi barang modal), dan kelihatan tanda-tanda bahwa produksi jauh di bawah kapasitas. Di samping faktor-faktor lainnya, terbatasnya pasaran sangat mempengaruhi kelambanan pertumbuhan produksi.

Pasaran utama barang modal seharusnya ditimbulkan oleh program-program pembangunan pemerintah. Tetapi karena sebagian besar program-program ini pembiayaannya berasal dari dana luar negeri, pasaran barang modal umumnya tertutup bagi produsen dalam negeri. Biasanya bantuan asing bilateral disertai syarat-syarat tertentu mengenai pengimporan barang-barang yang diperlukan dan dengan demikian produsen dalam negeri sama sekali tidak mendapat kesempatan (misalnya besi beton). Dalam hal bantuan multilateral dan proyek-proyek yang seluruhnya atau sebagian besar dibiayai dari sumber-sumber dalam negeri, produsen barang modal dalam negeri ditempatkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan karena persaingan yang tidak wajar. Produksi barang modal dalam negeri masih tergan-

tung atas impor bahan baku dan ongkos produksinya mengandung pajak dan bea impor; di lain pihak barang modal yang diimpor bebas dari bea dan pajak. Di samping adanya sikap bahwa mutu barang impor lebih tinggi, harganya pun lebih murah, dan hal ini membatasi daya saing produsen dalam negeri.

3. SKALA USAHA INDUSTRI DAN PROSPEK PENANAMAN MODAL JANGKA PENDEK

Sensus industri tahun 1973 juga menunjukkan besarnya peranan industri kecil dalam menyediakan kesempatan kerja; cabang industri ini menyerap sekitar 70% tenaga kerja. Dipandang dari segi nilai tambah, sektor ini hanya menghasilkan di sekitar 22% (taksiran Bank Dunia) sampai 38% (taksiran Bank Pembangunan Asia) dari seluruh nilai tambah sektor industri. Dalam tahun-tahun 1973-1975 laju pertumbuhan sektor industri kecil (sekitar 5%) jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka-angka laju pertumbuhan industri besar dan menengah (16,7%) dan keseluruhan sektor industri (14,3%). Dari peningkatan riil nilai tambah sektor industri sebesar Rp. 199 milyar (atas dasar harga tahun 1973), hanya sekitar 7% berasal dari industri kecil. Dengan demikian prosentase bagian yang dihasilkan sektor industri kecil makin menurun.

Walaupun demikian, karena pola investasi yang terbayang untuk masa dekat ini sangat padat modal, perluasan penggunaan tenaga kerja di sektor industri banyak bergantung pada sektor industri kecil. Menurut taksiran Bank Dunia, dalam tahun-tahun 1977-1979 jumlah penanaman modal rata-rata dapat mencapai US\$ 2,4 milyar tiap tahunnya; penanaman modal sektor industri kecil hanya 2% dari jumlah keseluruhan tersebut. Hubungan antara penanaman modal dan perluasan kesempatan kerja dalam jangka dekat dan menurut pola investasi sekarang dapat dilihat dari tabel berikut.

PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM REPELITA III

=====

PENANAMAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA,
1977—1979 (Angka rata-rata tahunan, dalam US\$)

	Penanaman modal		Pertambahan penggunaan tenaga kerja		Penanaman modal per tenaga kerja
	Jumlah (jutaan US\$)	Pro-sen-tase	Jumlah (jutaan US\$)	Pro-sen-tase	
1. Skala besar	1.470	60,7	4.200	4,0	350.000
Petro kimia	570	23,5	380	0,4	1.500.000
Baja	270	11,2	900	0,9	300.000
Pupuk	270	11,2	950	0,9	280.000
Semen	190	7,8	775	0,7	240.000
Gula	160	6,6	1.200	1,1	133.000
Industrial estate	10	0,4	—	—	—
2. Proyek lain yang Disetujui BKPM	570	23,5	40.200	38,5	14.300
Kerajinan tangan dan lain-lain	180	7,4	17.800	—	10.300
Kimia	160	6,6	6.400	6,1	25.200
Tekstil	150	6,2	10.500	10,1	13.900
Logam dan mesin	80	3,3	5.500	5,3	14.800
3. Industri kecil	60	2,5	60.000	57,5	1.000
4. Penggantian modal	320	13,2	—	—	—
Jumlah	2.420	100,0	104.400	100,1	23.200

=====

Sumber: World Bank, *Problems and Prospects for Industrial Development in Indonesia* (Report No. 1647-IND, 25 May 1978)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jangka 1977-1979 penambahan penggunaan tenaga kerja tiap tahunnya kurang dari separuh yang diharapkan Repelita II (sebesar 240 ribu). Dari investasi tahunan sebesar US\$ 2,4 milyar, lebih dari 60% sangat padat modal (dengan investasi per tenaga kerja sebesar US\$ 350 ribu) dan dengan demikian hanya dapat menam-

ANALISA

pung sekitar 4% dari keseluruhan penambahan penggunaan tenaga kerja sektor industri. Di lain pihak, walaupun penanaman modal industri kecil mungkin hanya merupakan kurang dari 3%, cabang industri ini dapat menampung penambahan penggunaan tenaga kerja yang lebih dari 57%.

Dapat dicatat bahwa walaupun penambahan penggunaan tenaga kerja pada industri skala besar dapat dilipatgandakan tiga kali, dan pada proyek-proyek lain yang disetujui BKPM dua kali, penambahan penggunaan tenaga kerja di sektor industri kurang dari 160 ribu, jauh di bawah harapan Repelita II. Jadi ditinjau dari segi perluasan kesempatan kerja, masalahnya bukan sekedar menambah penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan proyek-proyek baru yang disetujui BKPM, tetapi lebih mendasar sifatnya.

Untuk menanggulangi masalah dasar ini diperlukan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah yang sifatnya padat karya. Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan industri kecil dan menengah ini tidak hanya dapat dicapai melalui investasi baru tetapi juga dengan meningkatkan daya guna kapasitas produksi yang ada. Pengembangan ini memerlukan perluasan pasar; adanya tendensi kejenuhan pasar di beberapa cabang industri belum berarti bahwa kemungkinan perluasan pasar sudah tertutup. Kejenuhan terjadi menurut harga yang berlaku: kalau harganya sangat tinggi, pasaran dengan sendirinya diperkecil.

Dengan harga yang tinggi, di satu pihak rakyat yang ingin membeli belum tentu mempunyai daya beli yang cukup, dan di lain pihak rangsangan timbul untuk penyelundupan. Jadi perlu adanya usaha-usaha yang ditujukan ke arah penekanan biaya produksi, sedemikian rupa sehingga hasil produksi dalam negeri harganya dapat bersaing dengan hasil-hasil luar negeri. Dengan harga bersaing perluasan pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga dapat disertai tindakan agresif dalam memasuki pasaran luar negeri (selama biaya tambahan menurun dan lebih kecil dari penghasilan tambahan, penambahan produksi

akan memperbesar untung atau memperkecil rugi; dengan demikian harga ekspor dapat dibuat lebih rendah dari biaya produksi rata-rata).

Untuk pengembangan industri kecil dan menengah, juga perlu diusahakan agar hubungan antara industri-industri ini dan industri besar sifatnya saling mengisi dan saling menunjang. Bukan seperti yang kadang-kadang terlihat bahwa pertumbuhan industri besar justru mematikan atau merintangikan pertumbuhan industri kecil dan menengah. Kalau hubungan antara cabang-cabang industri saling mengisi dan menunjang, dan pola pertumbuhan industri dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak (bukan hanya barang konsumsi tetapi juga termasuk faktor produksi, misalnya peralatan pertanian), dasar akan lebih kuat untuk makin meninggikan tingkat swasembada produksi bahan baku dan barang modal.

Biasanya untuk menghasilkan satu unit barang jadi diperlukan jumlah barang modal yang berlipat ganda. Efek-efek berganda terhadap perkembangan perekonomian dari substitusi impor barang jadi yang banyak tergantung atas barang modal dan komponen yang diimpor, akan lebih kecil kalau dibandingkan dengan efek-efek yang ditimbulkan oleh substitusi impor barang modal dan bahan baku (terutama kalau bahan baku ini diolah dari bahan mentah yang dihasilkan di dalam negeri). Substitusi impor barang modal dan bahan baku akan lebih memperkukuh dan memperluas landasan pembangunan sektor industri dan pertumbuhannya lebih lanjut. Seperti telah dikemukakan di atas, beberapa cabang industri engineering dapat efisien dalam skala yang tidak besar dan relatif padat karya. Prospek ekspornya juga cukup baik, seperti terlihat dari pengalaman beberapa negara, misalnya India dan Korea Selatan akhir ini.

Pembinaan industri kecil dan menengah dapat diarahkan pada tiga tujuan pokok: pengolahan bahan mentah, produksi komponen, sub-assembly dan lain-lain dalam bidang industri engineering; dan produksi barang-barang konsumsi ringan. Pada taraf sekarang ini ruang lingkupnya terbatas pada proses pro-

ANALISA

duksi yang tingkat teknologinya sederhana serta skala usaha dan kebutuhan penanaman modal yang relatif kecil. Walaupun demikian perlu bimbingan dan dukungan kuat pemerintah. Terutama pada tingkat awal usaha, dalam mana pada umumnya industri kecil dan menengah kurang mampu dibandingkan dengan industri besar untuk mengambil risiko, terutama ke usaha-usaha baru belum dikenal.

Pembinaan industri kecil dan menengah berarti bahwa pasaran akan dilayani oleh sejumlah besar produsen. Dalam halnya dengan usaha-usaha baru pengetahuan masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan pasaran, biaya dan harga hasil produksi, teknologi yang dapat dipakai, risiko dan sebagainya umumnya kurang. Investor potensial baru akan terangsang untuk menanamkan modalnya kalau hasil-hasil dari pre-feasibility study cukup meyakinkan. Di lain pihak biaya pre-feasibility study besar jumlahnya sedangkan manfaatnya tidak menentu.

Kalau pengusaha besar mungkin mampu dan bersedia menanggung risiko melakukan pre-feasibility study, sukar diharapkan bahwa inisiatif akan datang dengan sendirinya dari pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Seandainya pun ada inisiatif ini, kemungkinan besar akan timbul pemborosan karena sejumlah besar pengusaha membiayai pre-feasibility study yang pada dasarnya bersifat duplikasi, sedangkan hasil masing-masing kalau ditinjau secara keseluruhan barangkali tidak dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti bahwa pengusaha tertentu terlalu optimistis atau pesimistis). Dengan demikian pembinaan industri kecil dan menengah memerlukan usaha aktif Departemen Perindustrian untuk melakukan prefeasibility study.

Sesudah itu peranan Pemerintah masih diperlukan dalam bentuk aktivitas-aktivitas promosi (misalnya seperti yang dilakukan Singapura). Paling tidak dalam tingkat-tingkat permulaan, bantuan teknis dan finansial dalam produksi dan pemasaran juga diperlukan. Bantuan finansial meliputi kredit-kredit investasi dan modal kerja, yang syarat-syaratnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan para pengusaha kecil dan menengah.

4. BEBERAPA MASALAH INDUSTRI DEWASA INI

Di kalangan para pengusaha kelihatannya ada keresahan dan kelesuan. Di samping pengaruh perkembangan ekonomi dunia, ada dua faktor penyebab pokok yang menyangkut keadaan di dalam negeri, pertama berkenaan dengan iklim industri dan kedua berhubungan dengan masalah ekonomi dan sosial.

a. Iklim Industri

Ada keluhan bahwa dewasa ini iklim usaha belum memungkinkan untuk dapat meramalkan, dalam jangka waktu yang cukup panjang, prospek usaha yang dapat diandalkan dan digunakan sebagai pegangan. Lepas dari benar tidaknya keluhan ini, akibatnya negatif karena pengusaha cenderung untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini mau tidak mau meninggikan tingkat harga. Juga proyek-proyek yang bersifat quick-yielding ini belum tentu menunjang perkembangan industri seterusnya.

Memang wajar bahwa dalam dunia usaha prospek jangka depan tidak dapat diandalkan seratus persen karena berubah-ubahnya selera masyarakat. Namun sepanjang ketidakpastian ini dapat ditanggulangi pemerintah, iklim industri akan menjadi lebih baik. Masalah utama adalah kurang jelasnya definisi tujuan yang hendak dicapai dalam mengembangkan sektor industri, dan dengan demikian kriteria yang dipakai terlalu umum sifatnya dan kurang dapat ditrapkan secara operasional. Akibatnya, di satu pihak para pengusaha tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai maksud pemerintah, dan mereka harus menebak serta meraba-raba. Di lain pihak, pada instansi pemerintah juga timbul kemungkinan adanya penafsiran yang berbeda-beda dari berbagai instansi yang bersangkutan atas suatu kebijaksanaan.

Walaupun usaha menanggulangi keadaan tersebut sudah ada, misalnya dengan pengeluaran Daftar Skala Prioritas, namun kelihatannya pelaksanaan dalam praktek kurang mencu-

kupi, seperti terlihat antara lain dari adanya ijin berkelebihan (over-licencing) dalam cabang-cabang industri tertentu; pertumbuhan-pertumbuhan yang agak pincang dari berbagai cabang industri serta kurangnya kaitan-kaitan antar-sektor; tendensi ke arah investasi yang padat modal serta adanya efek-efek sekunder negatif dari pertumbuhan industri besar, dan konsentrasi dari letak usaha-usaha industri di beberapa tempat tertentu di Jawa. Hal-hal ini timbul karena masalah utama tadi, yakni kurang jelasnya definisi tujuan yang hendak dicapai dari perkembangan industri, dan kurangnya kriteria spesifik yang berguna secara operasional.

Dengan demikian perhatian terlalu banyak dicurahkan pada kriteria yang bersifat teknis-finansial (karenanya menempatkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan sosial dalam kedudukan sekunder) serta pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri (sehingga mengabaikan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memasuki pasaran luar negeri). Terlalu banyak diperhatikan bagaimana caranya membangun pabrik serta kekuatan finansial suatu perusahaan (perbandingan antara modal tetap dan modal kerja serta debts-equity ratio, costs and benefit ratio, internal rate of return, sumber dan harga mesin-mesin, tax holiday, dan sebagainya). Pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi, yang seharusnya menjadi faktor penentu sebelum diterapkannya kriteria teknis dan finansial, dalam praktek malahan menjadi faktor sampingan.

Jadi tidak jelas apakah proyek-proyek yang disetujui efisien dan optimal, dalam arti bahwa perusahaan industri yang bersangkutan mampu memproduksi dengan biaya serendah-rendahnya, dan bahwasanya proyek-proyek yang bersangkutan adalah yang terbaik ditinjau dari perekonomian secara keseluruhan. Yang belakangan menyangkut tidak hanya tingkat-tingkat kaitan cabang-cabang industri, tetapi juga antara sektor industri dan sektor-sektor lainnya (terutama pertanian). Kalau kaitan-kaitan ini dijalin dalam tahap-tahap tertentu, sehingga hubungan antar cabang di sektor industri dan antara sektor industri dan sektor-sektor lainnya makin saling mengisi dan menunjang, akar struktur industri akan makin kukuh dan tercapai landasan yang

makin kuat untuk pertumbuhan selanjutnya. Dalam hubungan ini industri yang pada saat ini tidak efisien dalam jangka waktu tertentu dapat mampu menjadi efisien, dan dengan demikian pengembangannya dapat dipertanggungjawabkan.

Di lain pihak, jika usaha-usaha industri tumbuh secara terpisah dan masing-masing mempunyai kaitan yang lebih kuat dengan produsen luar negeri, industri masih mungkin untuk tumbuh secara pesat tetapi dasarnya rapuh dan rawan. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa substitusi impor atas dasar ini pada akhirnya bukan mengurangi kebutuhan devisa, tetapi malahan justru menambah penggunaannya. Biaya produksinya biasanya jauh lebih tinggi daripada impor; perlindungan dari saingan impor yang pada awalnya dimaksudkan untuk sementara dalam praktek menjadi permanen.

Proteksi semacam ini lebih banyak mempunyai efek negatif daripada positif. Di satu pihak pengusaha ditempatkan dalam kedudukan monopolistis, atau semi-monopolistis; tidak atau kurang adanya saingan tidak memberikan insentif untuk menekan biaya produksi, dan kecenderungan juga tidak ada untuk mengurangi ketergantungan atas komponen-komponen impornya. Di lain pihak pasarannya statis: harga yang tinggi tidak mendorong pertumbuhan permintaan, sedangkan industri-industri yang komponen impornya sangat besar sumbangannya kecil terhadap peninggian tingkat hidup dan pemerataan pendapatan. Pasar yang monopolistis atau semi-monopolistis dan yang pertumbuhannya terbatas pada gilirannya mengakibatkan dipertahankannya biaya tinggi. Adalah menyedihkan kalau rakyat banyak harus memikul biaya tinggi ini untuk mempertahankan kedudukan segelintir industriawan, apalagi kalau industri-industri yang bersangkutan sebagian milik asing.

Persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan iklim industri tadi mungkin disebabkan karena pemerintah agak pasif dalam menentukan (dan mendukung) bidang-bidang yang perlu mendapatkan prioritas, dan agak aktif dalam membatasi ruang lingkup usaha. Menjelang Repelita III ini dapat dipikirkan

peranan yang terbalik dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah aktif dalam mengambil inisiatif untuk membina dan mengembangkan industri-industri yang diberikan prioritas utama (tidak hanya untuk pasaran dalam negeri tetapi juga untuk ekspor), dan memberi kebebasan yang wajar terhadap industri-industri lainnya. Diutamakannya kepentingan rakyat banyak berarti bahwa biaya produksi kedua macam industri ini tidak banyak berbeda dengan produksi luar negeri. Ini berarti bahwa perlindungan industri dari saingan impor (dan juga untuk memajukan ekspor) lebih banyak diarahkan pada penekanan biaya produksi (dengan memberikan bantuan teknis dan finansial, fasilitas-fasilitas, keringanan, dan kalau perlu subsidi), dan kurang bergantung pada bea dan pajak impor yang tinggi.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Ada suara bahwa kelesuan industri disebabkan oleh rendahnya daya beli rakyat. Ini kelihatannya agak dibikin-bikin. Misalnya daya beli rakyat India rendah, tetapi belakangan ini perkembangan industri pesat berkat naiknya ekspor hasil industri; hal yang sama juga berlaku pada Korea Selatan pada masa lampau yang belum terlalu lama. Walaupun masalah daya beli rakyat ini penting, persoalannya hanya relevan kalau produksi semata-mata ditujukan untuk pasaran dalam negeri. Juga timbul persoalan apakah dibatasinya pertumbuhan industri oleh rendahnya daya beli rakyat tidak lebih disebabkan oleh kurang cocoknya industri-industri yang bersangkutan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak (misalnya karena lebih mengutamakan pasaran untuk mereka yang berpendapatan tinggi), atau oleh terlalu tingginya harga barang yang dihasilkan.

Peningkatan daya beli rakyat erat hubungannya dengan penurunan tingkat harga di satu pihak dan di lain pihak dengan pemerataan pendapatan dan peninggian tingkat hidup rakyat. Dengan pendapatan yang sama daya beli rakyat naik kalau harga hasil-hasil industri turun. Harga hanya dapat diturunkan kalau biaya produksinya dapat ditekan, dan pada gilirannya ada hubungan timbal balik antara luas pasar dan biaya produksi:

sampai batas tertentu, makin luas pasarnya makin rendah biaya produksinya, dan makin rendah harga barang makin luas pasarnya.

Usaha pemerataan pendapatan dan peninggian tingkat hidup rakyat akan kurang optimal hasilnya selama sebagian besar investasi dan proses produksi lebih cenderung pada padat modal dan selama sebagian besar komponen-komponen hasil industri masih tergantung atas impor. Biasanya untuk proyek-proyek yang padat modal peralatannya kompleks dan hampir secara keseluruhannya harus didatangkan dari luar negeri; dengan demikian akibat-akibat berantai dari proses investasi itu sendiri terhadap produksi dalam negeri sangat minimal adanya. Di lain pihak, proses produksi yang padat modal juga berarti bahwa bagian dari nilai tambah yang dihasilkan tenaga kerja kecil; dengan demikian sesudah produksi berjalan pun akibat langsungnya terhadap pemerataan pendapatan dan peninggian tingkat hidup rakyat relatif kecil.

Studi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (*Promoting Small-Scale Industries: The Role of the Asian Development Bank*, Staff Paper No. 16, December 1976) untuk negara-negara lain menunjukkan bahwa kemampuan peralatan modal untuk menciptakan lapangan kerja makin besar semakin kecil unit perusahaannya. Di samping itu, efisiensi peralatan modal kelihatannya tidak berkurang, dan dalam halnya dengan beberapa negara, efisiensi modal juga makin bertambah dengan makin kecilnya unit industri. Dengan kata lain, penanaman modal pada industri-industri kecil, dibandingkan dengan jumlah yang sama pada industri-industri besar, mempunyai kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas tanpa mengurangi jumlah produksi ditinjau secara keseluruhan. Apakah hal ini juga berlaku bagi Indonesia masih perlu diselidiki lebih lanjut.

Bagaimanapun juga, kalau pemerataan pendapatan dan peninggian tingkat hidup rakyat banyak hendak dicapai antara lain melalui perluasan kesempatan kerja dan penyebaran lokasi

industri, dan seandainya produk yang sama dapat dihasilkan oleh industri besar maupun industri kecil, maka untuk mencapai tujuan tadi industri kecil harus lebih diutamakan. Pengutamaan industri kecil ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, untuk memenuhi volume pasar yang sama unit-unit perusahaan kecil jumlahnya lebih banyak sehingga dapat lebih tersebar di beberapa pelosok. Kedua, industri kecil lebih padat karya; digabungkan dengan alasan pertama tadi, industri kecil membawa akibat langsung yang lebih besar terhadap pemerataan pendapatan dan peninggian tingkat hidup rakyat banyak. Ketiga, peralatan industri kecil relatif lebih sederhana sehingga memungkinkan diciptakannya tahap-tahap pembikinannya di dalam negeri. Keempat, industri kecil memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan.

Di lain pihak, pembinaan dan pengembangan industri kecil juga menimbulkan masalah-masalah khusus yang cukup rumit. Keuntungan-keuntungan yang disebutkan di atas masih berupa potensial dan sifatnya teoritis; realisasinya memerlukan penanggulangan masalah-masalah tersebut. Beberapa contoh dari masalah-masalah ini dapat disebutkan. Pertama, penyebaran industri hanya dapat efektif bilamana fakta-fakta produksi (termasuk infrastruktur) dan pasaran hasil-hasilnya cukup tersebar di daerah-daerah. Selama hasil produksi masih sangat tergantung atas impor bahan baku, dan biaya distribusi bahan impor tadi di dalam negeri masih tinggi, serta frekwensi dan kontinuitas distribusi bahan impor tidak dapat dipastikan, mau tidak mau perusahaan-perusahaan industri akan berpusat di sekitar pelabuhan-pelabuhan utama. Dengan demikian industri besar mungkin akan jauh lebih efisien.

Kedua, banyak dari pengusaha-pengusaha industri kecil yang akan dikembangkan mungkin terdiri dari mereka yang baru saja terjun untuk pertama kali dalam bidang industri (misalnya dahulu biasa berdagang). Kemungkinan mereka untuk sukses dalam bidang industri belum terbukti. Jadi kalau dalam memperkenankan industri besar pemerintah sedikit banyak dapat lepas tangan, dalam mengembangkan industri kecil peranan aktif pemerintah diperlukan.

Ketiga, industri kecil umumnya lebih rawan dalam menghadapi kesukaran finansial dan kurang mampu dalam membiayai promosi penjualannya. Kelemahan ini mengakibatkan kepekaan mereka terhadap persaingan yang tidak wajar. Misalnya perusahaan yang kuat, dengan maksud melumpuhkan saingan-saingannya, dapat membanting harga jauh di bawah biaya produksi dan menanggung biaya advertensi besar-besaran; kerugian yang diderita saat ini dapat ditutup di kemudian hari setelah para saingan mati dan pasar dikuasai. Jadi perlu adanya perlindungan terhadap persaingan yang tidak wajar, tetapi hal ini sulit untuk dilaksanakan.

Keempat, akibat-akibat berantai terhadap perekonomian dari pengembangan industri kecil hanya dapat terjadi kalau harga peralatan modal buatan dalam negeri dapat bersaing dengan barang modal impor. Hal ini tidak dimungkinkan bila mana tahap-tahap produksi pembuatan modal di dalam negeri dikenakan berbagai macam pajak sedangkan impor barang modal bebas pajak. Di samping itu, pembelian barang modal luar negeri dapat melalui suppliers credit sedangkan untuk yang dibuat di dalam negeri melalui fasilitas kredit dalam negeri; biasanya biaya perkreditan luar negeri (bukan hanya bunga uang tetapi juga ongkos-ongkos administrasinya) lebih murah. Jadi bukan hanya harga dan mutu harus dapat bersaing, tetapi juga syarat-syarat pembelian dan penggunaannya.

Kelima, struktur biaya produksi dewasa ini kelihatannya lebih menyebabkan industri besar menang posisi. Misalnya fasilitas accelerated depreciation lebih menguntungkan industri yang padat modal. Untuk investasi dan modal kerja, industri besar dapat memobilisir dana yang lebih murah (antara lain dari luar negeri, yang kemungkinannya sedikit banyak tertutup bagi industri kecil). Dalam pembelian bahan-bahan baku, industri besar dapat memperoleh pertanyaan yang lebih banyak; dalam menjual hasil-hasil produksinya, lebih mampu membiayai pemasaran; dan sebagainya.

Dalam hubungannya dengan masalah kredit dapat dicatat bahwa pemerintah telah memberi perhatian khusus pada industri

kecil melalui program-program KIK dan KMKP. Pada saat ini masih terlalu pagi untuk menilai keberhasilan program-program ini, terutama kalau ditinjau dari kemungkinan replikasinya dalam bentuk yang besar-besaran. Jumlah kredit-kredit ini relatif kecil: berdasarkan angka-angka akhir 1977, KIK dan KMKP hanya meliputi di sekitar 4% seluruh kredit perbankan, dan untuk sektor industri sekitar 3%. Sebagian besar dari kredit-kredit tadi jangka waktunya masih belum jatuh; dengan demikian masih belum diketahui berapa dari mereka yang tidak mampu membayar kembali atau terpaksa menunggak (di negara-negara berkembang lain biasanya jumlah penunggakan dan default rate untuk industri kecil cukup tinggi). Di samping itu, pada waktu yang lalu kebanyakan dari kredit-kredit tadi dipergunakan untuk perbaikan atau perluasan industri kecil yang ada; persoalan yang akan dihadapi dalam pemberian kredit kepada industri-industri baru jauh lebih kompleks sifatnya.

Adanya pelbagai macam persoalan, yang contoh-contohnya disebutkan di atas, di satu pihak, dan masih kaburnya makna dan implikasi kriteria sosial ekonomi yang secara operasional dapat dijadikan pegangan di lain pihak, dengan sendirinya memaksa dipergunakannya kriteria teknis finansial. Dengan adanya persoalan-persoalan tadi, penggunaan kriteria teknis finansial cenderung menumbuhkan industri besar. Di samping itu permasalahannya juga berbeda secara esensial. Dalam hubungannya dengan industri besar. selama prospek pemasarannya cukup baik, inisiatif untuk mendirikan pabrik-pabrik dengan sendirinya akan datang dari pengusaha besar nasional maupun asing; secara kasarnya pertumbuhan industri besar tergantung pada apakah pemerintah bersedia memberikan ijin dan fasilitas. Di lain pihak, dalam hubungannya dengan pengembangan industri-industri kecil, seperti telah dikemukakan di atas, peranan aktif pemerintah diperlukan, berupa bimbingan dan dukungan, bukan hanya pada tahap-tahap produksi dan pemasaran tetapi juga dalam menimbulkan adanya inisiatif berproduksi.

5. BEBERAPA MASALAH KHUSUS EKSPOR HASIL INDUSTRI

Peningkatan daya beli rakyat, pemerataan pendapatan dan peninggian tingkat hidup rakyat memerlukan proses jangka panjang serta kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh. Sementara ini, rendahnya daya beli rakyat di satu pihak, dan pesatnya pertumbuhan industri substitusi impor di lain pihak, menimbulkan adanya keterbatasan pada pertumbuhan lebih lanjut sektor industri. Untuk mengatasinya, perhatian perlu diarahkan pada peningkatan daya kemampuan mengekspor hasil-hasil industri; peningkatan daya ekspor ini juga erat hubungannya dengan usaha-usaha perluasan lapangan kerja dan diversifikasi serta peningkatan hasil ekspor.

Pada saat ini, baik dalam arti jumlah mutlak maupun secara relatif, ekspor hasil-hasil industri Indonesia masih sangat kecil. Jumlahnya hanya merupakan di sekitar 1% keseluruhan pendapatan ekspor. Di waktu yang lalu perhatian terlalu banyak dicurahkan pada substitusi impor. Belakangan ini pemerintah telah melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor hasil-hasil industri, tetapi kelihatannya rintangan-rintangan yang dihadapi masih terlalu besar. Peningkatan ekspor hasil industri masih memerlukan perbaikan-perbaikan dalam daya saing harga dan mutu, prosedur administratif, serta fasilitas-fasilitas ekspor. Dapat dicatat bahwa importir di luar negeri pada umumnya baru tertarik untuk membeli kalau disainnya sesuai dengan selera masyarakatnya, harganya lebih murah dari sumber-sumber lain, dan ada kesanggupan menyediakan barang dalam jumlah besar dalam waktu tertentu dan dengan jaminan mutu yang distandar-disir.

Ada kesan bahwa harga hasil-hasil industri Indonesia pada umumnya lebih tinggi dari negara-negara lain (termasuk ASEAN). Ada yang menyatakan bahwa struktur tarif sedemikian rupa sehingga bea impor untuk bahan-bahan baku lebih tinggi dari yang untuk impor barang jadi; kalau ini benar industri processing untuk ekspor sukar dikembangkan. Keadaan

pelabuhan-pelabuhan, dan prosedur administratif yang memakan waktu, meninggikan ongkos muatan dan angkutan (bahkan untuk mengekspor barang dari bonded warehouse pun memerlukan waktu yang cukup lama). Studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia mengenai ongkos muatan dan angkutan ke Amerika Serikat untuk barang-barang yang sama menunjukkan bahwa yang dari Indonesia jauh lebih tinggi.

Dengan usaha yang sungguh-sungguh kesukaran-kesukaran yang berhubungan dengan tingginya biaya produksi, muatan dan angkutan dalam beberapa hal dapat diatasi. Misalnya, berkat kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, Indonesia baru-baru ini dapat mengekspor semen ke Thailand dan bir ke Jepang. Fasilitas-fasilitas ekspor (termasuk kredit ekspor dan asuransi), juga dapat meningkatkan ekspor pihak swasta, terutama dari industri-industri yang mempunyai banyak kelebihan kapasitas produksi. Bagi industri-industri ini, ongkos tambah untuk meningkatkan volume produksi biasanya sampai tingkat tertentu lebih rendah dari ongkos rata-rata per unit produksi barang. Dengan demikian, selama jumlah total dari ongkos tambah produksi dan biaya-biaya untuk mengekspor masih lebih rendah dari penghasilan ekspor per unit barang, ekspor akan masih tetap menguntungkan walaupun harganya lebih rendah dari biaya produksi rata-rata.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan ekspor hasil-hasil industri juga diperlukan penemuan pasaran-pasaran baru serta bantuan terhadap industri-industri yang mampu memenuhi kebutuhan pasaran-pasaran ini. Bantuan tersebut perlu diarahkan kepada perbaikan daya saing. Ini memerlukan penanggulangan faktor-faktor yang mempertinggi biaya produksi, muatan dan angkutan, serta peringanan pembiayaan untuk keperluan ekspor.

6. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dalam jangka waktu 10 tahun belakangan ini sektor industri tumbuh dengan pesat. Bagian terbesar dari pertumbuhannya

berasal dari industri-industri yang padat modal dan produksinya terutama ditujukan pada substitusi impor. Terbatasnya pasaran, pesatnya pertumbuhan industri, dan perkembangan ekonomi di dunia internasional, semuanya menimbulkan adanya tendensi ke arah kejenuhan pasar. Masalah ini lebih dipersulit oleh kenyataan bahwa beberapa industri merasakan saingan buat impor, dan karenanya timbul anjuran-anjuran untuk memperketat proteksi.

Sementara ini dirasakan adanya keresahan dan kelesuan di kalangan usahawan. Investasi yang melalui BKPM dalam Repelita III tiap tahunnya secara riil barangkali tidak melebihi tingkat puncak tahun 1973. Ini tidak berarti bahwa laju pertumbuhan industri akan jauh menurun. Ada industri-industri yang produksinya masih di bawah kapasitas penuh; kalau keadaan pasar memungkinkan, industri-industri ini dapat memperbesar produksi tanpa meningkatkan investasi modal tetap. Di samping itu sebagian dari permohonan-permohonan penanaman modal yang telah disetujui baru akan mulai berproduksi pada masa Repelita III. Sasaran laju pertumbuhan sebesar 11% rata-rata setahun dapat dicapai, dan bahkan ada kemungkinannya dapat dilampaui.

Untuk mencapai sasaran sebesar 11% kiranya sulit kalau sebagian besar investasi di sektor industri masih terutama ditujukan pada substitusi impor barang-barang konsumsi. Ruang lingkup substitusi impor semacam ini makin ciut karena pesatnya pertumbuhan industri di masa lalu, tingginya harga hasil produksi dalam negeri, dan terbatasnya daya beli rakyat. Pengembangan sektor industri lebih lanjut memerlukan perluasan cabang-cabang industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi serta pendalaman struktur industri; pengembangannya akan lebih pesat kalau pasarannya tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga meliputi luar negeri.

Perluasan bidang industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi tidak hanya dapat dicapai melalui makin besarnya penggantian impor dengan produksi dalam negeri. Tetapi juga dengan memperbesar produksi yang cocok dengan

ANALISA

pola hidup sederhana, yakni dengan memperbanyak industri-industri yang orientasi produksinya ialah menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Untuk berhasil diperlukan biaya produksi, angkutan dan pemesanan yang rendah sehingga harganya murah, dan rakyat banyak dengan pendapatannya yang relatif masih rendah sekarang ini mampu membelinya. Harga yang murah juga memperbesar kemampuan mengeksport.

Pendalaman struktur industri memerlukan usaha-usaha untuk lebih banyak memproduksi di dalam negeri barang-barang modal dan bahan-bahan baku yang diperlukan untuk produksi barang-barang konsumsi tadi. Biaya produksinya perlu ditekan serendah-rendahnya karena pada akhirnya akan tercermin pada harga-harga barang konsumsi. Pendalaman struktur industri ini akan makin berhasil dengan makin sederhananya proses produksi yang dipakai untuk menghasilkan barang-barang konsumsi. Proses produksi ini lebih cocok untuk industri-industri yang skala usahanya relatif kecil.

Untuk menjamin pesatnya perkembangan industri, diperlukan perluasan pasaran baik di dalam maupun di luar negeri, untuk barang-barang konsumsi serta barang-barang modal dan bahan-bahan baku. Perluasan pasaran ini dalam jangka pendek erat hubungannya dengan penekanan biaya produksi dan pemasaran. Jadi masalah utama yang dihadapi ialah bagaimana caranya menekan biaya produksi dan pemasaran sampai serendah-rendahnya sehingga tidak saja memperkuat daya saing hasil-hasil industri dalam negeri terhadap impor tetapi juga memungkinkan untuk memasuki pasaran ekspor. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Departemen perindustrian dan Departemen-departemen lain (termasuk Keuangan, Perdagangan dan Koperasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dalam Negeri, Luar Negeri) dan aparaturnya pemerintah lainnya.

Dengan demikian perkembangan industri memerlukan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh untuk memperluas pasaran

baik di dalam maupun di luar negeri. Perluasan pasaran ini hanya dapat dicapai dalam tahap-tahap tertentu. Karenanya diperlukan adanya pola dasar pembangunan industri yang tahap-tahap pelaksanaannya terperinci. Berdasarkan pola dasar ini, cabang-cabang industri yang paling diutamakan dapat ditentukan, dan perhatian pemerintah dapat dicurahkan pada pembinaan dan pengembangan cabang-cabang industri ini. Perkembangan industri dapat serentak mempertinggi daya beli rakyat kalau harga hasil produksinya lebih murah dan proses produksinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja.

LENGKAPILAH KUMPULAN ANALISA ANDA :

<p>ANALISA 1978 - 1</p> <p style="text-align: center;">Perspektif 1978</p>	<p>ANALISA 1978 - 2</p> <p style="text-align: center;">Vietnam — Kamboja, Selat Malaka & Masalah Rasial</p>	<p>ANALISA 1978 - 3</p> <p style="text-align: center;">PANCASILA Arti dan Penerapannya</p>	<p>ANALISA 1978 - 4</p> <p style="text-align: center;">Dinamika Hubungan Internasional</p>
<p>ANALISA 1978 - 5</p> <p style="text-align: center;">KEBUDAYAAN dan PENDIDIKAN</p>	<p>ANALISA 1978 - 6</p> <p style="text-align: center;">STRATEGI GLOBAL dan ASIA TENGGARA</p>	<p>ANALISA 1978 - 7</p> <p style="text-align: center;">Beberapa Segi PEMBANGUNAN NASIONAL</p>	<p>ANALISA 1978 - 8</p> <p style="text-align: center;">Berbagai Masalah Dalam Negeri</p>
<p>ANALISA 1978 - 9</p> <p style="text-align: center;">Negara-negara ASEAN</p>	<p>ANALISA 1978 - 10</p> <p style="text-align: center;">SUMPAH PEMUDA dan Persatuan Indonesia</p>	<p>ANALISA 1978 - 11</p> <p style="text-align: center;">Persaingan TIMUR — BARAT</p>	<p>ANALISA 1978 - 12</p> <p style="text-align: center;">Pembinaan GENERASI MUDA</p>
 <small>CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES</small>	 <small>CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES</small>	 <small>CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES</small>	 <small>CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES</small>

Masih tersedia judul-judul di atas. Harga a Rp. 700,—. Pesanan luar kota tambah ongkos kirim 15%. Masih tersedia pula judul-judul yang lain, buku-buku, Ringkasan Peristiwa, The Indonesian Quarterly, Mintalah Daftar Publikasi CSIS ke :
Biro Publikasi CSIS, Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telp. 349489.